

**IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Rencana Aksi
1	Pemanfaatan Aset di luar tujuan pemerintahan yang menjadi kewenangannya	Pejabat eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional berdasarkan tupoksi yang ada	Menggunakan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penggunaan Aset bagi ASN di DPMD 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Identifikasi Potensi Korupsi 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengendalian Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN menggunakan aset sesuai dengan tupoksi yang ada 2. ASN yang menyalahgunakan barang akan diberikan sanksi oleh pimpinan sesuai dengan prosedur 3. Menandatangani Pakta Integritas. 4. Membuat surat pernyataan pengendalian gratifikasi
2	Potensi penerimaan gratifikasi pada saat penyaluran dana ADD dan DD	Kepala Desa dan Perangkat Desa	kurangnya pemahaman pihak desa terkait prosedur penyaluran DD dan ADD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran DD dan ADD 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Identifikasi Potensi Korupsi 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengendalian Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak pengajuan yang tidak sesuai prosedur 2. Sosialisasi prosedur penyaluran DD dan ADD berikut kelengkapan dan batasan waktu 3. Teguran dan evaluasi

Lumajang, 25 September 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



MUSTAJIB, A.Ma, PKB., SH.
NIP. 19730410 199703 1 005